

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sebuah kota tidak dapat terlepas dari kebutuhan berbagai sarana dan prasarana layanan publik sebagai pendukung kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan populasi perkotaan yang pesat berdampak terhadap kebutuhan sarana dan prasarana. Pertambahan kebutuhan akan infrastruktur tersebut berpengaruh terhadap proses pembangunan dan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota. Hal ini menuntut tindakan profesional dari pemerintah untuk sebuah pengelolaan.

Pemerintah kota menjalankan peranan penting dalam pengelolaan layanan perkotaan. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat menyebabkan pertumbuhan kota yang sulit dikendalikan. Untuk itu, Pemerintah Kota dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan layanan publik di kawasan perkotaan sehingga diharapkan tujuan pembangunan perkotaan dapat terwujud.

Transportasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat untuk

¹ Adisasmita,2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Halaman 22

melakukan aktivitasnya sehari-hari. Aktivitas-aktivitas di pusat kota yang tinggi akan berpengaruh terhadap tarikan pergerakan kendaraan yang besar pada jaringan jalan sekitarnya. Kendaraan tidak selamanya bergerak, pada suatu saat akan berhenti sehingga menjadikan parkir sebagai elemen penting dalam transportasi. Dengan demikian, fasilitas parkir perlu dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota untuk menunjang sistem transportasi perkotaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa parkir sangat dibutuhkan dan merupakan bagian dari fasilitas publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Penyediaan tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sebagai salah satu layanan publik perkotaan, perparkiran diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat khususnya pemakai jasa parkir. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayah perkotaan, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari layanan publik.

Pelayanan parkir saat ini harus di tinjau lebih jauh, karena saat ini pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sangat pesat. Khususnya di daerah Malang sendiri yang banyak terdapat sekitar 62 Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Merdeka Malang, Politeknik Negeri Malang, Institut Teknologi Nasional dan masih banyak lagi. Banyaknya Perguruan Tinggi tersebut berimbas pada penggunaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sangat banyak. Pertumbuhan

pengguna sepeda motor tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswa yang ada di Kota Malang.

Akibat banyaknya pengguna sepeda motor tersebut digunakan juga untuk meraih keuntungan bagi para juru parkir di Kota Malang. Seperti yang sudah tercantum dalam Perda tidak dilaksanakan oleh para juru parkir, seperti tidak memberikan karcis sesuai dengan hak pengguna yg diatur berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan: “*Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) , diberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir*”. Dan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 16 ayat (1) tempat parkir yang dimaksud adalah tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.

Dari fakta yang terjadi di lapangan, bahwa masih banyak juru parkir tidak menerapkan Perda tersebut. Karena kurangnya sosialisasi juga bisa berakibat para juru parkir tersebut bertindak tidak sesuai dengan perda yang ada dimana banyak juru parkir tidak memberikan karcis kepada pengguna kendaraan bermotor.

Tabel 1.1

Data tempat parkir di tepi jalan umum

No	Tempat	Keterangan
1	Parkiran jalan Arjuno	Tidak menggunakan karcis

2	Jalan Bromo	Tidak menggunakan karcis
3	Jalan Nusakambangan	Tidak menggunakan karcis
4	Jalan Ade Irma Suryani	Tidak menggunakan karcis
5	Jalan Kauman Dalam	Tidak menggunakan karcis

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa juru parkir tidak melaksanakan ketentuan yang ada. Jarak antara aturan yang tercantum dalam Perda dan pelaksanaan di lapangan masih kurang. Masih banyak yang harus dibenahi dari para juru parkir agar tidak bertindak sepihak. Akibat dari perbuatan juru parkir yang tidak sesuai dengan Perda tersebut sangat merugikan pengguna sepeda motor di Kota Malang. Perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor terhadap perbuatan juru parkir yang bertindak tidak sesuai Perda tersebut juga belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Ketidak efektifan yang dilakukan oleh juru parkir ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berkopetensi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan perparkiran, sehingga para juru parkir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Melihat fenomena dan permasalahan diatas dalam penerapan implementasi pemberian karcis

parkir di tepi jalan umum, maka hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam tentang pelaksanaan parkir umum yang dilaksanakan di Kota Malang dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR"**.

Tabel 1.2
Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	2012	Ismail Dwi Saputra, E 121 08 521, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar	1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir di perusahaan daerah parkir di Makassar Raya? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan retribusi parkir di perusahaan daerah di Makassar
2.	2015	Rezky Anantama, NPM: 1216041086, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas	Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota	Raya? 1. Bagaimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan PAD pada sektor

		Lampung Bandar Lampung	Bandar Lampung	retribusi parkir di Kota Bandar Lampung? 2. Apa sajakah hambatan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam peningkatan PAD di kota Bandar Lampung?
--	--	---------------------------	-------------------	---

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas:

1. Bagaimana implementasi dari Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait pelayanan parkir di kota Malang?
3. Bagaimana upaya dinas perhubungan kota Malang dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut selama ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor hambatan dalam menerapkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan tempat parkir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir di Kota Malang.
 - b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir di Kota Malang.

b. Bagi fakultas

Memberikan tambahan referensi untuk bahan materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan.

c. Bagi petugas parkir

Karena penelitian ini untuk menertibkan petugas parkir agar taat kepada ketentuan peraturan daerah dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan daerah.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, pengetahuan tentang hukum dan penerapannya di lapangan terkait tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan parkir di Kota Malang.

e. Bagi Pemerintah Kota Malang

Agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi petugas parkir yang bertindak menyimpang dari ketentuan peraturan daerah dan memberi

perlindungan bagi pengguna kendaraan yang terkena imbas dari tindakan menyimpang petugas parkir.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri. Didalam satu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Peneliti membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian beberapa topik secara luas berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam penelitian ini

BAB V: PENUTUP

Dalam penutup penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dari berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.